

Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali Nusra

Ika Sulistiani¹⁾, M. Irwan²⁾, Ade Paranata³⁾

¹²³ Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia

E-mail: ¹sulistianiika1@gmail.com, ²dae_irwan@unram.ac.id, ³adeparanata@unram.ac.id

Article Information

Submit: 24-04-2025

Revised: 06-05-2026

Accepted: 31-05-2026

Abstrak

Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara belanja pemerintah terhadap kesejahteraan Masyarakat di kawasan Bali Nusa Tenggara. Variabel kesejahteraan diproksikan menggunakan PDRB per kapita ADHK, sedangkan variable penjelas terdiri atas belanja Kesehatan, belanja Pendidikan, belanja infrastruktur, PMTB, konsumsi rumah tangga dan dummy Covid-19. Data yang digunakan merupakan data panel kabupaten/kota di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur selama periode 2014-2022. Metode analisis yang digunakan merupakan regresi data panel dengan model Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan dan konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Belanja pendidikan dan PMTB berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan belanja infrastruktur dan dummy Covid-19 tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel dalam model berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan alokasi, kualitas pelaksanaan program, pemerataan investasi dan kemampuan menjaga daya beli masyarakat. **Kata kunci:** Belanja pemerintah, Covid-19, Kesejahteraan masyarakat, Konsumsi rumah tangga PMTB.

Abstract

This study analyzes the relationship between government expenditure and community welfare in the Bali Nusa Tenggara region. Community welfare is proxied by GDRP per capita at constant prices, while the explanatory variables consist of health expenditure, education expenditure, infrastructure expenditure, Gross Fixed Capital Formation (GFCF), household consumption, and the Covid-19 dummy variable. The data used are panel data covering regencies/cities in Bali, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara Provinces during the 2014–2022 period. The analytical method used is panel data regression with the Fixed Effect Model. The results show that health expenditure and household consumption have a positive and significant effect on community welfare. Education expenditure and GFCF have a negative and significant effect, while infrastructure expenditure and the Covid-19 dummy variable do not have a significant effect. Simultaneously, all variables in the model have a significant effect on community welfare. These findings indicate that improving community welfare is not only determined by the size of the budget, but also by the accuracy of allocation, the quality of program implementation, the distribution of investment, and the ability to maintain people's purchasing power.

Keywords: Covid-19, Government expenditure, GFCF, Household consumption, Public welfare,

PENDAHULUAN

Belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dapat memperkuat kapasitas ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap pelayanan public. Di negara berkembang seperti Indonesia, belanja pemerintah pada sektor-sektor strategis tersebut berperan dalam mempercepat pembangunan wilayah. Pane et al. (2020) menyatakan bahwa investasi pemerintah pada sektor-sektor strategis dan infrastruktur berkontribusi penting dalam meningkatkan kapasitas produktif sumber daya manusia, terutama di kawasan Indonesia bagian timur.

Sukirno dalam Anantika & Sasana (2020) menjelaskan bahwa belanja pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berfungsi untuk menyediakan barang dan jasa publik serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui sektor kesehatan,

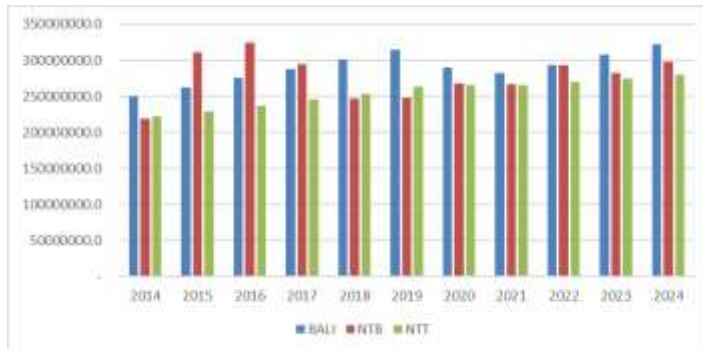
pendidikan, dan infrastruktur. Belanja pemerintah pada sektor kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas, tenaga kesehatan, dan layanan yang lebih merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji untuk kesehatan, sedangkan pemerintah daerah minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Alokasi anggaran yang memadai di sektor kesehatan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas tenaga kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Apriska et al. (2024) menyatakan bahwa investasi pemerintah di sektor kesehatan dapat memperluas akses layanan kesehatan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Belanja pemerintah pada sektor pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, karena pendidikan menjadi salah satu bentuk investasi sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja dapat meningkat. UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD. Namun, besarnya anggaran pendidikan perlu diimbangi dengan pengelolaan yang efektif agar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Fahmi & Dalimunthe (2018) menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang besar harus didukung oleh efektivitas pengelolaan supaya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Belanja pemerintah pada sektor infrastruktur berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya transaksi, serta mendorong produktivitas ekonomi. Dalam perspektif teori *public capital*, Aschauer (1989) menjelaskan bahwa investasi pemerintah pada infrastruktur mampu meningkatkan efisiensi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan temuan Sky & Azwardi (2023) yang menunjukkan bahwa belanja infrastruktur publik berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

Kawasan Bali Nusra yang terdiri dari Provinsi Bali, NTB, dan NTT memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Bali cenderung didukung oleh sektor pariwisata dan jasa, sedangkan NTB dan NTT lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Perbedaan tersebut menyebabkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat antarwilayah belum merata, terutama karena beberapa daerah di NTB dan NTT masih memiliki keterbatasan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta kapasitas fiskal. Ketimpangan kesejahteraan tersebut terlihat dari perkembangan PDRB per kapita ADHK selama periode 2014–2024. Indikator ini digunakan karena mampu menggambarkan pendapatan riil masyarakat tanpa dipengaruhi inflasi (Irwan et al., 2022). Berdasarkan data BPS, Bali memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi, NTB menunjukkan pola yang berfluktuasi, sementara NTT mengalami peningkatan bertahap tetapi masih lebih rendah dibandingkan Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di kawasan Bali–Nusa Tenggara masih belum merata.

Tabel 1. Perkembangan PDRB Per kapita Provinsi Bali, NTB, NTT.



Sumber BPS 2014-2024.

Berdasarkan grafik PDRB per kapita ADHK Provinsi Bali Nusra periode 2014–2024, Bali secara umum menunjukkan nilai PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan NTB dan NTT. Nilai PDRB per kapita Bali meningkat dari sekitar Rp25 juta pada tahun 2014 menjadi sekitar Rp32 juta pada tahun 2024. Sementara itu, NTB memperlihatkan pola perkembangan yang berfluktuasi, dari sekitar Rp22 juta pada tahun 2014, meningkat pada 2015–2016, kemudian mengalami penurunan pada 2018–2019, dan kembali naik hingga sekitar Rp30 juta pada tahun 2024. Adapun NTT menunjukkan tren peningkatan yang lebih stabil, dari sekitar Rp22 juta pada tahun 2014 menjadi sekitar Rp28 juta pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat di kawasan Bali–Nusa Tenggara cenderung meningkat, meskipun masih terdapat ketimpangan antarprovinsi.

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh belanja pemerintah, tetapi juga oleh faktor makroekonomi seperti investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi yang diprosikan melalui PMTB berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi daerah, sedangkan konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli masyarakat dan menjadi salah satu komponen utama PDRB. (Padli et al., 2017) menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam struktur PDRB dan berperan dalam mendorong permintaan agregat. Oleh karena itu, PMTB dan konsumsi rumah tangga digunakan sebagai variabel kontrol agar analisis lebih komprehensif.

Selain itu, pandemi Covid-19 perlu diperhitungkan karena sejak tahun 2020 menyebabkan perlambatan ekonomi, penurunan pendapatan, dan pelemahan sektor tertentu, terutama pariwisata. Dampak ini sangat terasa di Bali yang ekonominya bergantung pada sektor pariwisata. Oleh sebab itu, dummy Covid-19 digunakan untuk membedakan kondisi sebelum dan saat pandemi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah belum optimalnya belanja pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di kawasan Bali Nusra. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena memisahkan belanja pemerintah ke dalam tiga sektor utama serta memasukkan PMTB, konsumsi rumah tangga, dan dummy Covid-19 sebagai variabel kontrol. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali, NTB, dan NTT selama periode 2014–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2018) dalam Pakaya et al., (2023) menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data berupa angka dan dianalisis dengan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian Sugiyono (2013) dalam Somba et al., (2021) menyatakan bahwa penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan PDRB per kapita ADHK, sedangkan variabel independennya terdiri atas belanja pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, digunakan variabel kontrol berupa PMTB, konsumsi rumah tangga, serta dummy Covid-19. Variabel ekonomi diukur dalam satuan miliar rupiah, sementara dummy Covid-19 menggunakan kode 0 untuk periode sebelum pandemi dan 1 untuk periode saat pandemi. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, DJPK Kementerian Keuangan, dan instansi pemerintah terkait lainnya..

Objek penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, NTB dan NTT selama periode 2014–2024. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data lintas wilayah (cross section). Teknik pengambilan sampel menggunakan sensus data sekunder dengan pendekatan purposive sampling berdasarkan ketersediaan data yang lengkap selama periode penelitian. Kemudian, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan memasukkan PMTB, konsumsi rumah tangga, dan dummy Covid-19 sebagai variabel kontrol. Tahapan analisis meliputi estimasi *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan model terbaik melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, uji F, uji t, dan analisis koefisien sdeterminasi.

Model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 Z1_{it} + \beta_5 Z2_{it} + \beta_6 Z3_{it} + \varepsilon_{it}$$

Y = Kesejahteraan masyarakat yang diprosikan melalui PDRB per kapita ADHK, dengan satuan miliar rupiah

X1 = Belanja pemerintah pada sektor kesehatan, dengan satuan miliar rupiah

X2 = Belanja pemerintah pada sektor pendidikan, dengan satuan miliar rupiah

X3 = Belanja pemerintah pada sektor infrastruktur, dengan satuan miliar rupiah

Z1 = Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dengan satuan miliar rupiah

Z2 = Konsumsi rumah tangga, dengan satuan miliar rupiah

Z3 = Dummy Covid-19, yang dinyatakan dalam kode angka 0 dan 1

β_0 = Konstanta

β_1 – β_6 = Koefisien regresi

ε = Error term atau komponen kesalahan

i = Kabupaten/kota sebagai unit wilayah penelitian

t = Tahun penelitian atau periode pengamatan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kawasan Bali Nusra dalam penelitian ini mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga provinsi tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Bali lebih didominasi oleh sektor jasa dan pariwisata, sedangkan NTB dan NTT masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Perbedaan ini menyebabkan variasi dalam kapasitas ekonomi, alokasi belanja pemerintah, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara umum, PDRB per kapita ADHK periode 2014–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat di ketiga provinsi, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Tabel 2. Perkembangan PDRB per kapita ADHK

Tahun	BALI	NTB	NTT
2014	249.712.915	218.678.741	221.937.055
2015	262.520.014	311.566.755	229.096.181
2016	275.679.741	324.846.133	236.812.272
2017	287.570.363	293.987.239	245.169.239
2018	301.150.319	246.148.161	253.832.918
2019	314.572.486	248.280.366	263.127.596
2020	290.018.000	267.570.908	265.487.751
2021	281.992.000	266.700.135	265.533.969
2022	293.195.000	293.857.746	269.453.798
2023	307.702.000	282.412.662	274.463.520
2024	321.764.000	298.191.995	280.522.000

Sumber: hasil olahan data, 2026

Provinsi Bali mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020–2021 karena struktur perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pariwisata. Setelah masa pandemi, PDRB per kapita Bali kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024. Sementara itu, NTB menunjukkan perkembangan yang lebih berfluktuasi, sedangkan NTT mengalami kenaikan yang lebih lambat, tetapi relatif stabil.

Tabel 3 Deskriptif Statistic

Deskriptif Statistic	PDRB	R_KES	R_PEND	R_INFRST	R_INVEST	R_KRT	COVID
Median	1.643.000	4.195.000	7.372.000	1.476.000	7.360.000	7.900.000	0
Maximum	1.900.000	2.654.000	2.871.000	2.013.900	9.640.000	9.900.000	1
Minimum	1.557.000	3.250.000	0	0.23	5.340.000	6.180.000	0
Std. Dev.	0.622126	3.699.187	4.976.431	2.932.097	0.956072	0.861421	0.386457

Sumber: hasil olahan data, 2026

Berdasarkan Tabel 3, kesejahteraan masyarakat memiliki median 16,43, nilai maksimum 19,00, minimum 15,57, serta standar deviasi 0,622. Hal ini menunjukkan bahwa variasi kesejahteraan antarwilayah di Bali Nusra relatif kecil. Sebaliknya, belanja pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menunjukkan variasi yang lebih besar, yang menggambarkan perbedaan alokasi anggaran antardaerah. Sementara itu, PMTB dan konsumsi rumah tangga cenderung lebih stabil, sedangkan dummy Covid-19 digunakan dengan nilai 0 dan 1 untuk membedakan periode sebelum dan saat pandemi.

Tabel 4. Hasil Pemilihan Model Regresi

Uji Model	Statistik	Probabilitas	Keputusan	Model Terpilih
Uji Chow	796.876810	0.000	Prob. < 0,05	Fixed Effect Model
Uji Hausman	69.952181	0.000	Prob. < 0,05	Fixed Effect Model

Sumber: hasil olah data, 2026

Berdasarkan Tabel 4, hasil Uji Chow memperlihatkan nilai probabilitas sebesar 0,000, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model (FEM)* lebih layak digunakan dibandingkan *Common Effect Model (CEM)*. Selanjutnya, hasil Uji Hausman juga memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga *FEM* lebih

tepat dipilih dibandingkan *Random Effect Model (REM)*. Dengan demikian, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Variabel	Model 1	Model Kuadratik
Belanja Kesehatan	0.0003** 0.0378	9.774e-07 0.1346
Belanja Pendidikan	-0.0003*** 0.0106	-8.977e-07* 0.0613
Belanja Infrastruktur	0.0001 0.3917	8.068e-07 0.3148
Investasi (PMTB)	-0.7378*** 0.0015	-0.4254*** 0.0023
Konsumsi RT	0.7421*** 0.0000	0.0003** 0.0378
Covid 19	-0.0086 0.2523	-0.0058 0.4357
R. Squared	0.5364	0.5130
No. Observations	451	451

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2026

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model (FEM)* di peroleh persamaan berikut:

$$Y_{it} = \alpha + 0,0003 B_KES_{it} - 0,0003 B_PEND_{it} + 0,0001 B_INFRAST_{it} - 0,7378 PMTB_{it} + 0,7421 KRT_{it} - 0,0086 DC_{it} + e_{it}$$

Pada Tabel 5 belanja pemerintah sektor kesehatan memiliki koefisien sebesar 0,0003 dengan probabilitas 0,0387, sehingga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita ADHK. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pemikiran Sen, (1999) yang menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dari kenaikan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Selain itu, Murphy & Topel, (1988) menjelaskan bahwa peningkatan kesehatan dan harapan hidup memiliki nilai ekonomi karena mampu meningkatkan produktivitas serta memperpanjang masa produktif masyarakat.

Sebaliknya, belanja pemerintah sektor pendidikan memiliki koefisien -0,0003 dengan probabilitas 0,0106, yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan belum mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan selama periode penelitian.. Temuan ini didukung oleh Fernando & Yustie, (2025) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan dapat berpengaruh negatif signifikan apabila pengelolaan anggaran belum berjalan efektif dan belum tepat sasaran..

Sementara itu, belanja pemerintah sektor infrastruktur memiliki koefisien 0,0001 dengan probabilitas 0,3917, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita ADHK. Hal ini berarti bahwa belanja infrastruktur memiliki arah pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan, namun dampaknya belum terbukti signifikan secara statistik. Hasil ini sejalan dengan Fadilla & Ratnawati, (2024) serta Banase & Purwono, (2024) yang menunjukkan bahwa belanja infrastruktur dapat memiliki arah positif, tetapi belum tentu berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada variabel kontrol, PMTB memiliki koefisien -0,7378 dengan probabilitas 0,0015, sehingga berpengaruh negatif dan signifikan, Hasil ini sejalan dengan Pratiwi & Kurniasari, (2023) yang menjelaskan bahwa PMTB dapat berkorelasi negatif dengan pertumbuhan inklusif apabila manfaat investasi belum terdistribusi secara merata.

Sedangkan konsumsi rumah tangga memiliki koefisien 0,7421 dengan probabilitas 0,0000, yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara

teoritis, temuan ini sesuai dengan teori Keynes melalui Absolute Income Hypothesis yang menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan saat ini. Selain itu, (Friedman, 1957) melalui Permanent Income Hypothesis menjelaskan bahwa konsumsi juga dipengaruhi oleh pendapatan jangka panjang yang diharapkan. Sementara itu, (Modigliani & Brumberg, 1954) melalui Life-Cycle Hypothesis menyatakan bahwa rumah tangga cenderung mempertahankan pola konsumsi dengan mempertimbangkan pendapatan saat ini, pendapatan masa depan, dan kebutuhan sepanjang siklus hidup.

Adapun dummy Covid-19 memiliki koefisien -0,0086 dengan probabilitas 0,2523, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita ADHK. Arah negatif tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 cenderung menurunkan kesejahteraan masyarakat, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Temuan ini sejalan dengan Sari & Riyanto, (2022) yang menjelaskan bahwa pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, baik pada sektor formal maupun informal.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolenieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.012825	7.898.184	NA
Belanja Kesehatan	1.72E-09	6.770772	3.850078
Belanja Pendidikan	1.58E-09	1.013637	2.808681
Belanja Infrastruktur	4.80E-09	3.257387	1.195726
PMTB	0.000653	2190818	7.989289
Konsumsi RT	0.000873	3470406	9.292453
Covid-19	3.36E-05	1.397485	1.314280

Sumber: hasil olah data, 2026

Menurut Ghozali (2021) dalam Neovit et al., (2023), uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang kuat antarvariabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Sebaliknya, apabila nilai Tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10, maka model tersebut terindikasi mengalami gejala multikolinearitas.

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa nilai Centered VIF pada seluruh variabel independen berada di bawah batas 10. Nilai Centered VIF masing-masing variabel yaitu belanja kesehatan sebesar 3,850, belanja pendidikan 2,809, belanja infrastruktur 1,196, PMTB 7,989, konsumsi rumah tangga 9,292, dan Covid-19 1,314. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinearitas. Artinya, tidak terdapat hubungan linear yang kuat antarvariabel independen, sehingga model layak digunakan untuk tahap analisis berikutnya.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.002911	0.005005	-0.58166	0.5611
Belanja Kesehatan	8.98E-07	2.60E-06	0.345738	0.7297
Belanja Pendidikan	-1.19E-06	2.27E-06	-0.52468	0.6001
Belanja Infrastruktur	2.19E-06	2.32E-06	0.943682	0.3459
PMTB	0.000499	0.000815	0.612212	0.5407
Konsumsi RT	3.23E-06	0.00112	0.002888	0.9977
Covid_19	4.01E-06	0.000132	0.030457	0.9757

Sumber: hasil olah data, 2026

Menurut Ghozali (2018) dalam Dafa et al., (2022) uji heteroskedastisitas dengan uji glejser menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai Signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
- Jika nilai Signifikansi $< 0,05$ yang berarti terdapat gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas seluruh variabel berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Belanja kesehatan memiliki probabilitas sebesar 0,7297, belanja pendidikan 0,6001, belanja infrastruktur 0,3459, PMTB 0,5407, konsumsi rumah tangga 0,9977, dan Covid-19 0,9757. Dengan demikian, model regresi dinyatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Artinya, varians residual dalam model bersifat konstan atau homoskedastis, sehingga model telah memenuhi salah satu asumsi klasik.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial, Uji Simultan dan Determinasi

R-squared:	0.5364
Log-likelihood	610.55
F-statistic:	77.913
P-value	0
Distribution:	F(6,404)
F-statistic (robust):	98.300
P-value	0
Distribution:	F(6,404)

Sumber: hasil olahan data, 2026

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tingkat signifikansi 5%, variabel belanja kesehatan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan nilai t-hitung sebesar 2,0746 dan probabilitas 0,0387. Belanja pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, dengan t-hitung -2,5664 dan probabilitas 0,0106. Sementara itu, belanja infrastruktur memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan, karena nilai t-hitung sebesar 0,8575 dengan probabilitas 0,3917. Pada variabel kontrol, PMTB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan, dengan t-hitung -3,1884 dan probabilitas 0,0015. Konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan, dengan t-hitung 20,631 dan probabilitas 0,0000. Adapun variabel Covid-19 menunjukkan pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan, dengan t-hitung -1,1464 dan probabilitas 0,2523.

Hasil uji F menunjukkan nilai Prob. F-statistic sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, serta nilai F-hitung sebesar 98,300 yang lebih besar dari 2,10. Artinya, belanja kesehatan, belanja pendidikan, belanja infrastruktur, PMTB, konsumsi rumah tangga, dan Covid-19 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinilai layak untuk dianalisis. Nilai koefisien determinasi atau R-squared sebesar 0,5364 menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model mampu menjelaskan variasi kesejahteraan masyarakat sebesar 53,64%, sedangkan sisanya sebesar 46,36% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Bali–Nusa Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja kesehatan dapat mendorong kesejahteraan melalui perbaikan akses layanan kesehatan,

mutu fasilitas, dan produktivitas masyarakat. Sebaliknya, belanja pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran pendidikan belum memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan karena manfaatnya bersifat jangka panjang dan bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran. Belanja infrastruktur berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan belum cukup kuat secara statistik. PMTB berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Adapun dummy Covid-19 berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, seluruh variabel dalam model berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Bali–Nusa Tenggara.

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat belanja kesehatan, mengevaluasi efektivitas belanja pendidikan, serta mengarahkan pembangunan infrastruktur pada sektor yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, investasi perlu diarahkan agar lebih inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti kemiskinan, pengangguran, upah minimum, ketimpangan, kualitas pendidikan, dan akses kesehatan agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara Apec. *Journal Of Economics*, 9(3), 167–178.
- Apriska, L., Irwan, M., Suprapti, I. A. P., & Anggara, J. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten / Kota Di Provinsi Ntb). *Jseb (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, 10(1), 1–11.
- Aschauer, D. A. (1989). Is Public Expenditure Productive? *Journal Of Monetary Economics*, 23(2), 177–200. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(89\)90047-0](https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0)
- Banase, M. A. D. D., & Purwono, R. (2024). The Influence Of Government Expenditure On The Human Development Index In Ntt Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 9(1), 109–119. <https://doi.org/10.20473/jiet.v9i1.57397>
- Dafa, F., Pratama, G., & Susanto, B. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Memperoleh Sustainability Reporting Award (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Asrrat Dan Sra Tahun 2015-2020). *Business And Economics Conference In Utilization Of Modern Technology*, 885–905.
- Fadilla, M. I., & Ratnawati, N. (2024). Peranan Pembangunan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Ekonomi: Journal Of Economic*, 15(1), 10–22.
- Fahmi, A., & Dalimunthe, K. A. (2018). Pengaruh Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan Dan Kesehatan, Dan Pdrbperkapita Terhadap Ipm. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2(1), 23–34.
- Fernando, B., & Yustie, R. (2025). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Propinsi-Propinsi Indonesia Tahun 2020-2024 The Influence Of Education Expenditure, Health Expenditure, And Grdp On Hdi In Indonesian Provinces For The Period 2020-2024. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 25(2), 267–278.
- Friedman, M. (1957). *A Theory Of The Consumption Function*. Princeton University Press.
- Irwan, M., Maryam, S., & Salmah, E. (2022). *Pengantar Pembangunan Dan Pertumbuhan Inklusif* (Cetakan Pe). Mataram University Press.
- Modigliani, F., & Brumberg, R. (1954). *Utility Analysis And The Consumption Function: An Interpretation*



- Of Cross-Section Data Bt - Post-Keynesian Economics* (K. K. Kurihara (Ed.); Hal. 388–436). Rutgers University Press.
- Murphy, K. M., & Topel, R. H. (1988). Estimating The Gains From Medical Research: An Economic Approach. In *Working Paper Series*. Federal Reserve Bank Of Chicago. <https://www.chicagofed.org/publications/working-papers/1988/wp-88-07>
- Neovit, F. F., Zunaida, D., & Anastuti, K. U. (2023). *Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Produksi Pt. Jenggong Mulya Jaya Sentosa)*. 12(2), 146–152.
- Padli, Hailuddin, & Wahyunadi. (2017). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Swasta Dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001-2017. *Majalah Ilmiah Unikom*, 17(2), 121–130.
- Pakaya, N., Arham, M. A., & Bumulo, F. (2023). Pengaruh Pengeluaran Dana Pendidikan, Dana Kesehatan, Dana Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (Jsep)*, 1(1), 1–9.
- Pratiwi, K. D., & Kurniasari, D. (2023). Penerapan Model Panel: Determinan Tingkat Pertumbuhan Inklusif Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 38–78. <https://doi.org/10.47266/Bwp.V6i1.163>
- Sari, Y. L., & Riyanto. (2022). Analisis Dampak Program Bantuan Sosial Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Keluarga: Studi Kasus Belanja Bantuan Sosial Dki Jakarta Tahun 2021. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 17239–17258. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V7i11.12045>
- Sen, A. K. (1999). *Development As Freedom*. Oxford University Press.
- Sky, M. W., & Azwardi, A. (2023). Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Infrastruktur Publik Dan Sektor Bantuan Operasional Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Indonesia Bagian Timur. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 6(2), 106–117. <https://doi.org/10.24127/Jf.V6i2.1848>
- Somba, A., S.M, E. D., & Sumual, J. I. (2021). *Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara*. 21(05), 63–74.